

## Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri

Anisa Dwi Rahmawati, Didik G. Suharto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: anisarhm2507@student.uns.ac.id

### Abstrak

Desa merupakan komponen penting tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan pesatnya globalisasi saat ini mendorong desa untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut dalam mendorong kemandirian desa. Saat ini hanya 37 desa dari 251 desa di Kabupaten Wonogiri yang dikategorikan sebagai desa mandiri, dimana kecamatan Manyaran hanya memiliki satu desa mandiri di dalamnya. Untuk itu, aparatur desa selaku Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik berperan penting dalam menjalankan digitalisasi pelayanan tersebut. Di desa dengan segala keterbatasannya jika dibandingkan dengan perkotaan dalam hal mengoperasikan teknologi masih dirasa masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan aparatur desa. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan *guidance theory* menggunakan STOPE Framework oleh Al-Osaimi, Alheraish, dan Bakry, yang terdiri dari *strategy, technology, organization, people, dan environment*. Kemudian, teknik pengumpulan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya menggunakan *software* NVIVO sebagai *tools* dalam analisis dan pemodelan data yang selanjutnya diuji validitas menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan aparatur desa di Kecamatan Manyaran dalam pengoperasian digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa sudah cukup siap namun masih ada beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan seperti mengintegrasikan digitalisasi dalam pembangunan, adaptasi aparatur desa, kualitas *performance* jaringan, serta kerjasama.

**Kata Kunci:** aparatur desa; desa; digitalisasi; *e-readiness*; STOPE Framework

### Abstract

Villages are an important component of governance in providing services to the community, so that the rapid globalization today encourages villages to adapt to these technological advances in encouraging village independence. Currently, only 37 villages out of 251 villages in Wonogiri Regency are categorized as independent villages, where Manyaran sub-district only has one independent village in it. For this reason, village officials as Human Resources responsible for providing public services play an important role in carrying out the digitization of these services. In the village with all its limitations when compared to urban areas in terms of operating technology is still considered very low. This study aims to determine the level of readiness of village officials. The type of research is qualitative research with guidance theory using the STOPE Framework by Al-Osaimi, Alheraish, and Bakry, which consists of strategy, technology, organization, people, and environment. Then, the collection technique is through interviews, observation, and documentation. Then, the data analysis used NVIVO software as a tool in data analysis and modeling which was then tested for validity using source triangulation techniques. The results of this study show that the village apparatus in Manyaran Sub-district in the operation of digitalization to realize village independence is quite ready but there are still

several aspects that need to be improved such as integrating digitalization in development, adaptation of village officials, quality of network performance, and cooperation.

**Keywords:** village apparatus; village; digitalization; e-readiness; STOPE framework

## **Pendahuluan**

Desa merupakan entitas sosial yang penting di dalam upaya membangun Indonesia secara utuh. Hal ini dikarenakan desa menjadi sistem pemerintahan yang secara langsung dapat bersentuhan dengan masyarakat. Menyadari pentingnya pembangunan yang harus mengikutsertakan desa di dalam mengelola serta mengatur arah pembangunan, maka pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tujuan untuk menyentuh lembaga pemerintahan terkecil yaitu desa dalam upaya pembangunan. Menurut Afrizal et al., (2022), upaya pembangunan dalam hal ini merupakan spirit yang terkandung di dalam peraturan desa yaitu mewujudkan desa mandiri dan desa membangun. Sehingga, upaya pemerintah untuk merealisasikannya tersebut yaitu dengan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2023 dengan menargetkan adanya peningkatan Desa Mandiri sedikitnya 5.000 desa (Kemendesa, 2022). Di satu sisi desa selalu diidentikkan dengan *image* tertinggal dan terbelakang, namun melalui digitalisasi suatu desa mampu memperbaiki kualitas organisasinya (Saidah et al., 2022). Hal ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak dapat menghindar dari berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin cepat baik seperti organisasi publik maupun organisasi swasta di berbagai tingkatan dalam melakukan pembangunan (Eprilianto et al., 2022).

Digitalisasi dengan kemandirian desa memiliki hubungan, dimana dengan adanya kemajuan digitalisasi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi akan memicu perkembangan inovasi di berbagai organisasi pemerintahan (Muhammad et al., 2023). Menurut Williams (2018), digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital dan data, yang mana penggunaan teknologi tersebut berhubungan dengan proses teknologi dan organisasi yang memungkinkan sebuah organisasi menjadi lebih gesit dan cepat. Hubungan antara digitalisasi dengan kemandirian juga dapat dikaitkan dengan dana desa yang mana juga mempengaruhi kemandirian desa. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (2) huruf a dimana disebutkan bahwa, “Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa”. Berdasarkan pasal tersebut, digitalisasi berupa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu cara untuk memperbaiki peningkatan kapasitas dan pembangunan desa, khususnya di dalam mencapai kemandirian desa.

Saat ini, upaya mewujudkan kemandirian desa menjadi salah satu jembatan pemerintahan dalam mempercepat pembangunan nasional (Eprilianto et al., 2022). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka status perkembangan desa menjadi pertimbangan untuk menentukan klasifikasi desa. Disini frasa mewujudkan kemandirian desa berhubungan dengan frasa status kemandirian desa, yang mana kedua kata tersebut mencerminkan upaya untuk meningkatkan kemandirian suatu desa. Mewujudkan kemandirian desa ini merujuk pada upaya atau langkah-langkah yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintahan desa agar desa tersebut dapat menjadi mandiri. Sedangkan untuk status kemandirian desa disini mengacu pada tingkat kemandirian yang telah dicapai oleh sebuah desa dalam waktu tertentu dan diukur dengan beberapa indikator. Oleh karena itu, mewujudkan kemandirian desa sangat berkaitan dengan status kemandirian desa, karena dengan langkah atau upaya upaya yang digunakan untuk mewujudkan kemandirian desa akan menciptakan dampak secara langsung pada status kemandirian desa tersebut.

Kabupaten Wonogiri memiliki 37 desa yang sudah dikategorikan sebagai desa mandiri dari 251 desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jumlah tersebut dapat dikategorikan sedikit mengingat jumlah desa mandiri di Indonesia di Tahun 2022 mencapai 6.238 desa dari 73.954 desa, dengan sisanya yaitu dikategorikan sebagai desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Kecamatan Manyaran menjadi salah satu dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri dengan 5 desa didalamnya. Indeks desa Membangun yang dimiliki oleh desa desa yang tersebar di Kecamatan Manyaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Manyaran (2022)

No	Desa	IDM
1.	Gunungan	0.6662
2.	Bero	0.7967
3.	Karanglor	0.8360
4.	Kepuhsari	0.6567
5.	Pijiharjo	0.7040

*Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari kelima desa yang ada di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri hanya terdapat satu desa yang sudah terkategori sebagai desa mandiri, yaitu desa Karanglor dengan nilai 0.8360.

Sedangkan keempat desa lainnya yaitu Desa Bero, Gunungan, Pijiharjo, dan Kepuhsari nilai kemandiriannya masih dibawah 0.8155. Sehingga, dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa baru Desa Karanglor saja yang sudah mencapai nilai tersebut di Kecamatan Manyaran.

Desa dengan segala keterbatasannya jika dibandingkan dengan perkotaan kebanyakan masih belum mampu di dalam merumuskan kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas desanya dengan berbasis teknologi digital. Menurut Lisnawati & Lestari (2019), desa yang baik adalah desa yang mampu merencanakan kegiatan yang harus dilakukannya untuk mencapai pembangunan. Oleh karena itu, dalam aspek sumber daya manusia maka dibutuhkan kesiapan dari seluruh aparatur desa dalam menghadapi era globalisasi dengan memberikan pelayanan publik yang berbasis digital untuk bersaing mewujudkan pembangunan desa. Kesiapan aparatur desa di era digital saat ini harus memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengoperasikan berbagai kegiatan kerjanya dengan menggunakan teknologi. Kesiapan atau *e-readiness* sendiri menurut Ahmed Dahwan & Raju (2021), diartikan sebagai pengukuran kesiapan kapasitas pada masyarakat, organisasi, atau negara untuk berpartisipasi dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Dimana pembangunan biasanya juga dapat diukur dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dari kapasitas negara maupun warganya dengan menggunakan efek positif TIK tersebut untuk pembangunan yang berkelanjutan (Scherer & Palazzo, 2011).

Di samping itu, untuk mewujudkan desa yang mandiri di Kecamatan Manyaran maka pemerintah juga perlu menyiapkan dan meningkatkan pemberdayaan terhadap para aparatur desa dan masyarakat ke dalam berbagai program yang ada dengan memanfaatkan digitalisasi. Pemberdayaan aparatur desa ini dilakukan untuk penguatan kemampuan dan kapasitas SDM sehingga di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal. Perangkat desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang termasuk bagian dari birokrasi negara dan memiliki tugas serta tanggungjawab di tingkat pemerintah desa. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga membawa implikasi terhadap kesiapan perangkat desa di Kecamatan Manyaran, baik di dalam pelayanan publik maupun pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian, sebagai garda terdepan maka pemerintah desa dituntut untuk bisa mempunyai sumber daya manusia yaitu perangkat desa yang memiliki kemampuan khususnya dalam menjalankan teknologi agar dapat era digitalisasi saat ini desa yang masih berstatus desa berkembang dan maju di Kecamatan Manyaran dapat meningkatkan statusnya menjadi desa yang mandiri.

Pengembangan *e-government* di Kabupaten Wonogiri sebagaimana yang telah menjadi instruksi dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 juga perlu diadaptasi di desa yang ada di Kecamatan Manyaran. Permasalahan yang ada di desa Kecamatan Manyaran yaitu selain dibutuhkan perencanaan dan dana yang besar, kesiapan aparatur desa juga menjadi permasalahan. Oleh karena itu, sebelum mengimplementasikan digitalisasi di

pemerintah desa guna mendukung pelayanan publik yang diberikan, perlu dilakukan pengukuran kesiapan dari aparat pemerintah desa agar implementasi tersebut dapat berjalan secara optimal. Pengukuran *e-readiness* pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan STOPE Framework oleh Bakry (2006), yang meliputi lima domain yaitu *strategy, technology, organization, people, dan environment*. Sehingga, berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu “Bagaimana Kesiapan Aparatur Desa dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri”.

### Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan *guidance theory* menggunakan STOPE Framework oleh Al-Osaimi, Alheraish, dan Bakry, yang terdiri dari *strategy, technology, organization, people, dan environment*. Lokasi yang dijadikan penelitian ini yaitu keempat desa yang statusnya masih belum mandiri di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri diantaranya yaitu Pemerintah Desa Gunungan, Bero, Kepuhsari, dan Pijiharjo. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian yaitu kepala desa beserta sekretaris desa di masing masing pemerintah desa. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode penarikan sampel yang digunakan adalah bersifat *purposive sampling* yang dikuatkan dengan *snowball sampling*. Kemudian analisis datanya menggunakan *software* NVIVO sebagai *tools* dalam analisis dan pemodelan data. Sedangkan untuk uji validitas penulis menggunakan teknik triangulasi data dimana triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber.

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda untuk tiap pemerintahan desa yang akan diteliti. Pertama, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara mendalam dan semua proses dalam wawancara tersebut telah direkam. Kemudian dari hasil rekaman tersebut peneliti melakukan transkrip wawancara untuk digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini. Hasil transkrip kemudian diolah peneliti dengan memanfaatkan aplikasi NVIVO versi 12, dimana terdapat tiga tahapan pemberian kode dalam pemrosesan data kualitatif yaitu *open coding, axial coding, dan selective coding*. Pada proses *open coding*, data yang telah dikumpulkan pada saat wawancara kemudian ditranskrip menggunakan MS. Word selanjutnya peneliti melakukan proses *axial coding* dimana peneliti memilah milah jawaban narasumber yang dianggap mewakili pertanyaan kemudian dikategorikan ke dalam *nodes-nodes* yang telah dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu domain pada teori yang digunakan. Kemudian proses terakhir yaitu *selective coding* yang mana pada proses ini peneliti melakukan analisis jawaban jawaban yang sudah dikategorikan tadi kedalam *nodes* untuk diketahui hubungannya. Hasil dari analisis yang dilakukan

menggunakan NVIVO versi 12 ini dijabarkan pada masing masing domain yaitu *Strategy, Technology, Organization, People, dan Environment*.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ini dituntut untuk mampu memanfaatkan digitalisasi sesuai dengan intruksi dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, sehingga dengan kemampuan memanfaatkan digitalisasi oleh aparatur desa tersebut mampu untuk meningkatkan kinerja perangkat atau aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga kedepannya dapat mewujudkan adanya kemandirian di desa tersebut. Kesiapan aparatur desa dalam digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa di Kecamatan Manyaran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kerangka kerja STOPE yang didalamnya meliputi *strategy, technology, organization, people, dan environment*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

#### **A. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa dari Domain Strategy**

Domain *strategy* berdasarkan Bakry (2004), menyatakan bahwa domain *strategy* dapat diukur melalui 2 sub-domain utama yaitu dengan perencanaan pengembangan di masa mendatang (*future development plans*) dan pengaruh kepemimpinan (*leadership*). Di dalam penelitian ini, domain strategi dalam kesiapan aparatur desa dalam digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa mencakup tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan perencanaan teknologi di masa mendatang dalam menunjang pelayanan pemerintah desa (*future development plans*) dan faktor kepemimpinan dalam penerapan digitalisasi di pemerintahan desa (*leadership*).

##### **a. Future Development Plans**

Dari adanya penerapan digitalisasi tersebut diketahui bahwa pemerintah desa di Kecamatan Manyaran untuk saat ini baru sekadar memiliki wacana mengembangkan digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan desa dalam mewujudkan kemandirian desa. Hal tersebut masih hanya sebatas wacana belum menjadi rencana untuk kedepannya, dikarenakan untuk melaksanakan rencana tersebut maka diperlukan adanya sumber daya yang banyak dan mendukung. Adapun salah satu bentuk wacana yang akan dilakukan untuk pengelolaan TIK di desa oleh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Manyaran yaitu dengan pemasangan wifi untuk setiap dusun yang ada di desa dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari layanan.

Rencana peningkatan pengetahuan TIK juga menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan dari aspek subdomain *future development plans*. Rencana peningkatan pengetahuan aparatur desa di bidang teknologi di tahun

2024 ini masih belum ada untuk menuju kesana. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk di tahun selanjutnya akan direalisasikan dikarenakan pemerintah desa mau tidak mau juga dituntut untuk dapat mengikuti *trend* saat ini untuk mendukung mereka dalam mengembangkan desanya agar dapat mewujudkan kemandirian desa. Disamping itu, upaya yang selalu dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendorong peningkatan kualitas dan keterampilan aparatur desa dalam digitalisasi yaitu dengan memberikan fasilitas berupa infrastruktur TIK maupun mengirim aparatur desa ke sosialisasi pelatihan yang diadakan.

b. Leadership

Berkaitan dengan penerapan digitalisasi, dalam penelitian ini aspek kepemimpinan dikaitkan dengan visi organisasi yang telah mendukung pembangunan desa untuk mewujudkan kemandirian dengan memasukkan aspek digitalisasi ke dalam visi pemerintah desa. Namun, dari hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa aspek digitalisasi belum dimasukkan ke dalam visi misi pemerintah desa hal tersebut dikarenakan masa pembuatan visi pemerintah desa adalah enam tahun sekali sehingga dikarenakan pada tahun 2019 digitalisasi belum marak dan belum menjangkau ke desa desa maka aspek tersebut belum tersinkronisasi dengan upaya pembangunan pemerintah desa.

Sedangkan untuk aspek *leadership* juga dilihat dari bagaimana keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan TIK. Kepala desa selaku pimpinan telah aktif ikut terlibat dalam proses digitalisasi yaitu dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan perangkat yang mereka punya sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan produktivitas. Kepala desa juga memiliki peran dalam proses yang berkaitan dengan penganggaran yang mana sekarang ini semua pelaporan dana pemerintah desa sudah harus dilakukan secara sistem dan kepala desa sebagai penentu harus melakukan secara langsung. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Manyaran telah memiliki pimpinan yang dinilai kompeten dan ikut terlibat aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, sampai saat ini kepala desa dalam mengajak masyarakat untuk memanfaatkan digitalisasi masih melalui para tokoh yang ada di desa sehingga untuk penyebaran informasi kadang kurang maksimal karena tidak menyeluruh dan tidak semua masyarakat bisa tersampaikan.

**B. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa dari Domain Technology**

Teknologi dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan teknologi informasi yang didalamnya meliputi komputer, laptop, maupun jaringan yang digunakan oleh aparatur pemerintah desa. Dalam konteks pengukuran kesiapan aparatur desa dalam digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa di Kecamatan Manyaran ini, domain teknologi dalam teori STOPE Framework dikaitkan dengan kondisi

pendukung berupa fasilitas Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), diantaranya yaitu:

a. ICT Basic Information Infrastructure

*ICT basic information infrastructure* difokuskan pada bagaimana ketersediaan infrastruktur perangkat TIK dan *performance* atau kendala infrastruktur TIK. Pemerintah desa di Kecamatan Manyaran selalu berupaya untuk melakukan penyediaan infrastruktur TIK dengan melakukan penganggaran untuk mendukung pekerjaan aparatur desa dalam melayani masyarakat yaitu berupa komputer, jaringan internet wifi, maupun printer. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyediaan infrastruktur koneksi internet di Pemerintah Desa Bero dan Gunungan sudah cukup bagus dan mendukung untuk kebutuhan pelayanan mewujudkan kemandirian desa. Hal tersebut berbeda dengan *performance* koneksi jaringan internet yang masih jadi salah satu permasalahan di Desa Pijiharjo dan Kepuhsari yang mana kondisi sinyal jaringan masih sangat kurang sekali. Salah satu penyebabnya ini dikarenakan lokasi desa yang tidak memungkinkan.

Tersedianya infrastruktur TIK di pemerintah desa sebagai wujud upaya pelayanan dari aparatur desa kepada masyarakat tentu tidak terlepas dari adanya kendala-kendala selama pemberian pelayanan. Begitu pula dengan pemerintah desa di Kecamatan Manyaran, mereka tidak terlepas dari adanya kegagalan selama proses pemanfaatan digitalisasi dalam upaya memberikan pelayanan pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian. Kegagalan tersebut diantaranya yaitu terkait server down, jaringan yang loading, adanya pemadaman atau listrik mati ketika jam pelayanan berlangsung, dll. Sehingga adanya kendala tersebut menghambat aparatur desa dalam menjalankan tugasnya karena mau tidak mau harus berhenti terlebih dahulu selama pemadaman tersebut sehingga membuat pelayanan kurang maksimal.

b. ICT e-Service Infrastructure

Kinerja perangkat yang dimiliki dalam proses pelayanan digital sudah dapat dikatakan memuaskan dalam proses pemberian pelayanan administrasi masyarakat seperti pengurusan akta, KK, e-KTP, dll secara online. Namun, sampai sejauh ini belum ada pelayanan aparatur desa yang berhubungan dan yang mendukung kegiatan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa. Sejauh ini mereka hanya sebatas memberikan pelayanan apabila ada mandat dari dinas atau kabupaten sehingga bukan dari inisiatif aparatur desanya sendiri untuk memberikan pelayanan sebagai pendorong masyarakat untuk lebih mandiri.

Untuk saat ini, pelayanan yang berbasis digital khususnya di aspek ekonomi yang baru saja dilakukan oleh aparatur desa adalah proses pendataan dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi masyarakat pelaku UMKM. Namun, pelayanan dalam aspek ekonomi tersebut masih belum maksimal,

dikarenakan belum mencakup semua masyarakat dalam artian belum semua masyarakat pelaku UMKM dijangkau oleh aparatur desa untuk kemudian didata dan didaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut dikarenakan masih banyak pelaku ekonomi yang tidak paham terkait teknologi digitalisasi.

c. ICT Provisioning

Keberadaan digitalisasi diharapkan membantu para aparatur desa dalam menangani segala proses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan pada saat sebelum pandemi covid-19, dimana pelayanan masih bersifat manual belum secara digital, para aparatur desa merasa mengalami kemudahan dari adanya era digitalisasi saat ini. Meskipun disisi lain para aparatur desa belum begitu lancar dalam mengoperasikan digitalisasi tetapi tetap saja dengan adanya layanan TIK ini mempermudah pekerjaan aparatur desa di Kecamatan Manyaran. Disamping itu, pemanfaatan digitalisasi juga membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan praktis sehingga pelayanan pun menjadi lebih efektif serta efisien dikarenakan prosesnya pun juga menjadi lebih ringkas yaitu hanya dengan tinggal meng-upload berkas ke sistem tentunya ini berbeda dibandingkan pada saat manual yang semuanya masih berupa pengumpulan berkas-berkas. Namun, dalam kemudahan dan peningkatan produktivitas yang diberikan oleh sistem tersebut, masih ditemukan adanya kendala atau hambatan yang dirasakan oleh para aparatur desa. Kendala tersebut diantaranya yaitu *loading*, *server down*, gangguan jaringan dll.

d. ICT Support

Pemerintah desa di Kecamatan Manyaran telah melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap perangkat infrastruktur TIK yang dimiliki oleh masing masing pemerintah desa. Pemeliharaan yang dilakukan oleh aparatur desa yaitu berupa perawatan sistem baik berupa *software* maupun *hardware*nya seperti peng-upgradean komputer yang dilakukan kurang lebih 4 bulan sekali, pembersihan file file sampah, ganti RAM, dll. Dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur TIK ini, pemerintah desa menganggarkan biaya di setiap tahunnya. Sampai sejauh ini anggaran biaya yang digunakan oleh pemerintah desa dalam membiayai proses perawatan infrastruktur diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, dari keempat pemerintah desa yang diteliti baru pemerintah desa Kepuhsari yang telah mempunyai aparatur desa yang sekaligus juga menjadi operator TIK di pemerintah desa tersebut. Sedangkan untuk yang lainnya untuk perawatan yang sifatnya berat dilakukan pemerintah desa dengan mengundang teknisi ahli.

**C. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa dari Domain Organization**

Dalam upaya perwujudan pelayanan pada masyarakat sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemandirian desa diperlukan adanya sebuah ikatan kerjasama

untuk bisa memenuhi kebutuhan serta tujuan masing masing (Tewal et al., 2017). Sebagai pengukuran kesiapan aparatur desa dalam digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa dapat juga ditinjau dengan menggunakan tolak ukur yang membahas terkait kondisi organisasi yang berhubungan dengan skill manajemen TIK serta bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan (Al-Osaimi et al., 2006). Domain *organization* terdiri dari dua sub domain yaitu *ICT management* dan *ICT cooperation among organization* (Bakry, 2004). Sedangkan, pada penelitian domain *organization* akan mencakup terkait adaptasi terhadap TIK serta bagaimana kualitas layanan TIK yang diterapkan pemerintah desa di Kecamatan Manyaran (*ICT management*) dan upaya kerjasama oleh aparatur pemerintah desa dalam pengembangan TIK untuk mewujudkan kemandirian desa (*ICT cooperation among organization*).

a. ICT Management

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai tolak ukur pengukuran kesiapan dari sub domain *ICT management* yaitu adaptasi perubahan aparatur desa terhadap perkembangan TIK serta bagaimana layanan TIK yang diterapkan di pemerintah desa. Pemerintah desa di Kecamatan Manyaran dalam proses adaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian desa ini ditemukan bahwa aparatur desa yang ada belum semuanya dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang mana didominasi oleh mereka para aparatur desa yang usianya sudah lanjut usia, dimana mereka untuk saat ini hanya menunggu waktu pensiunan.

Alasan dari susah nya para aparatur desa yang sudah lanjut usia tersebut dalam mengoperasikan teknologi digital untuk melayani masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu usia yang sudah lanjut usia, masalah penglihatan, maupun faktor pendidikan. Namun disisi lain infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang ada sudah disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan para aparatur desa di Kecamatan Manyaran dan hal tersebut dinilai sudah memberikan pengaruh yang positif bagi aparatur desa maupun masyarakat karena mampu mempermudah dan mempercepat pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dll.

b. ICT Cooperation Among Organization

Pemerintah desa di Kecamatan Manyaran dalam kegiatan peningkatan pengetahuan untuk memanfaatkan digitalisasi sejauh ini belum semua mampu untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan pengetahuan digitalisasi bagi aparatur desa maupun masyarakat. Dari empat pemerintah desa yang diteliti hanya satu yang sudah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yaitu desa Kepuhsari yang mana bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Sedangkan, untuk ketiga pemerintah desa lainnya belum mengadakan pelatihan atau sosialisasi yang bekerja sama dengan pihak manapun. Upaya yang baru dilakukan oleh

aparatur desa yaitu baru sebatas penyebarluasan informasi melalui whatsapp kepada kepala dusun, RT maupun RW dengan harapan dapat penyebarluaskan langsung pada masyarakat sekitar.

#### **D. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa dari Domain People**

Pada penelitian yang dilakukan ini domain *people* dalam kesiapan aparatur desa dalam digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa mencakup tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan kesadaran pemerintah desa terhadap aparatur desa dalam memberikan akses TIK (*awareness*), kesesuaian pekerjaan dan keterampilan aparatur desa menyelesaikan pekerjaan (*qualifications and jobs*), pelatihan digitalisasi pada aparatur desa (*education and training*), serta manajemen kemampuan dan produktivitas aparatur desa dalam pemanfaatan TIK (*management*).

##### a. Awareness

Pemerintah desa di Kecamatan Manyaran sudah memiliki akses yang telah diberikan dan disediakan oleh pemerintah desa untuk bisa mengoperasikan komputer dan infrastruktur TIK lainnya dalam memberikan pelayanannya pada masyarakat di era digitalisasi ini. Secara spesifik, masing masing aparatur desa sudah diberikan akses untuk memegang komputer khususnya untuk aparatur yang berhubungan langsung dalam melayani masyarakat seperti para kaur dan kasi, namun juga tidak menutup kemungkinan masih adanya pemakaian infrastruktur secara bersama-sama.

##### b. Qualifications and Jobs

Di masing masing pemerintah desa di Kecamatan Manyaran melek digital menjadi salah satu syarat keterampilan yang harus dimiliki aparatur. Sehingga dengan adanya melek digital yang dimiliki oleh aparatur maka akan membantu pemerintah desa dalam melayani masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa. Melek digital juga menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat mendaftar sebagai aparatur di pemerintah desa, karena untuk saat ini tes yang dilakukan semuanya secara online. Namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa masih diperlukan adanya perbaikan SDM. Hal tersebut dikarenakan untuk keterampilan TIK aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaan masih kurang dengan adanya aparatur desa yang sebagian belum mengerti dan belum bisa beradaptasi dengan digitalisasi saat ini. Aparatur desa yang sudah memiliki kemampuan dalam mengoperasikan digitalisasi untuk pelayanan masyarakat di pemerintah desa Kecamatan Manyaran didominasi oleh para aparatur desa yang masih muda karena hasil perekrutan yang baru yang menuntut untuk melek digital.

Di samping itu, aparatur pemerintah desa di Kecamatan Manyaran di dalam pembagian tugas dan pekerjaan juga telah disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan

tersebut. Selain sudah disesuaikan ketika aparatur mendaftar, pemerintah desa juga menyesuaikan dengan tupoksi yang ada. Akan tetapi, tidak jarang justru aparatur desanya yang menyesuaikan dan perlu beradaptasi lagi dengan pekerjaan yang dibebankan.

c. Education and Training

Pemerintah desa di Kecamatan Manyaran telah memberikan kesempatan pada aparatur desa untuk mengikuti pelatihan pelatihan guna meningkatkan kemampuan. Akan tetapi, pelatihan yang diselenggarakan tersebut sebatas dilakukan bersama pendamping desa serta beberapa juga ada pelatihan yang dilaksanakan di Kecamatan Manyaran. Pelatihan tersebut biasanya hanya diikuti oleh perwakilan dari aparatur desa, sehingga ketika diselenggarakan pelatihan di Kecamatan atau oleh dinas maka pemerintah desa akan mengirimkan satu atau dua aparatur desa sesuai dengan bidang yang dijadikan sasaran untuk mengikuti pelatihan.

Kemudian, pada aspek *education and training* juga terlihat bahwa dari keempat pemerintah desa ketiga desa yang ada belum pernah menyelenggarakan pelatihan secara inisiatif dari pemerintah desanya langsung untuk memberikan pelatihan kepada aparatur desanya terkait pemanfaatan dan pengoperasian teknologi. Hal tersebut berbeda dengan Pemerintah Desa Pijiharjo, selain pelatihan dari pendamping atau kecamatan Pemerintah Desa Pijiharjo sudah pernah menyelenggarakan pelatihan yang diadakan langsung dari pemerintah desa dengan mengundang Dinas Kominfo untuk memberikan pelatihan secara langsung untuk aparatur desa di pemerintah desa. Pelatihan yang diadakan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan media sosial untuk pengenalan desa. Meskipun tidak jarang ditemui jika aparatur desa setelah mengikuti pelatihan masih sering merasa bingung dan kesusahan dalam memahami terkait dengan pelatihan digitalisasi yang diberikan.

d. Management of ICT

Ketersediaan aparatur desa di Kecamatan Manyaran yang memiliki kemampuan di bidang teknologi sudah tercukupi meskipun di masing masing pemerintahan desa di Kecamatan Manyaran ada beberapa aparatur desa yang belum bisa beradaptasi dengan kemajuan digitalisasi saat ini. Dengan adanya sumber daya manusia yang terampil menggunakan digitalisasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat serta dengan adanya dampak positif yang ditimbulkan dari digitalisasi ini, membuat aparatur desa menjadi merasa terbantu sekali karena digitalisasi membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, praktis, efektif serta efisien. Di samping masih adanya keterbatasan yaitu masih adanya aparatur desa yang kurang mengerti akan digitalisasi ini, pemerintah desa dalam mengelola organisasi masih tetap mampu untuk menjaga performa kinerja mereka dalam melayani masyarakat sebagai upaya

mewujudkan kemandirian desa. Dengan kemudahan dari dampak digitalisasi yang didukung oleh adanya kemampuan dari beberapa aparatur desa di pemerintah desa Kecamatan Manyaran membuat mereka dapat menyelesaikan berbagai pelayanan dalam sehari dan tentunya hal tersebut berbanding terbalik dengan ketika sebelum era digitalisasi.

#### **E. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa dari Domain Environment**

Pada penelitian terkait kesiapan aparatur desa dalam digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian ini, domain *environment* yang digunakan ini mencakup mengenai sumber daya anggaran pemerintah desa untuk mendukung dan menunjang digitalisasi di pemerintah desa (*economy*), literasi aparatur desa terhadap digitalisasi (*knowledge*), serta kerjasama pemerintah desa dengan organisasi yang ada di masyarakat sekitar mengenai pemanfaatan digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa (*organization*).

##### **a. Economy**

Untuk pemerintah desa di Kecamatan Manyaran ternyata sudah melakukan penganggaran untuk peningkatan bimbingan teknis aparatur desa, dalam hal ini dinamakan sebagai biaya peningkatan kapasitas aparatur negara yang dianggarkan dari ADD. Biaya yang dianggarkan untuk bimbingan teknis ini sudah mencukupi untuk membiayai keperluan keperluan yang dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa terkait pengoperasian dan pemanfaatan digitalisasi dalam proses pelayanan terhadap masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian.

##### **b. Knowledge**

Literasi terhadap digitalisasi khususnya di bidang ekonomi sudah dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa Gunung dengan bantuan dari mahasiswa KKN serta desa Kepuhsari yang juga sudah mengadakan literasi digitalisasi bagi masyarakat. Namun, untuk dua desa lainnya yaitu Desa Bero dan Pijiharjo terkait pelaksanaan literasi tersebut belum melaksanakan. Pendidikan atau pelatihan yang diberikan oleh aparatur desa pada masyarakat sebagai upaya untuk peningkatan literasi digitalisasi di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan diantaranya yaitu mengenai cara mengemas produk, cara memfoto produk agar lebih menarik, serta cara memasarkan produk secara digital menggunakan media sosial. Dari adanya literasi yang diberikan oleh aparatur desa tersebut membuat masyarakat lebih berkembang dalam memanfaatkan digitalisasi, akan tetapi masyarakat yang memanfaatkan digitalisasi untuk jangka waktu yang lama masih sedikit dan banyak yang berhenti di tengah tengah dalam memanfaatkan digitalisasi untuk memasarkan produknya secara digital, dalam artian masyarakat yang aktif memanfaatkan masyarakat untuk memasarkan usaha mereka ada tetapi hanya sedikit.

c. Organization

*Organization* yang dimaksud yaitu jalinan kerjasama antara aparatur desa dengan organisasi yang ada di masyarakat. Dari adanya kerjasama antara aparatur desa dengan organisasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tentunya akan sangat membantu meningkatkan kegiatan di desa yang kemudian akan menjadi poin aktif tersendiri bagi pemerintah desa pada saat penilaian desa untuk mewujudkan kemandirian desa. Namun, aparatur desa di Kecamatan Manyaran belum ada yang melakukan kerjasama yang berhubungan digitalisasi dengan organisasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan organisasi di desa seperti karang taruna desa dirasa tidak aktif karena banyak anggotanya yang sudah merantau ke luar.

Berdasarkan hasil di atas yang dilihat dari STOPE Framework dengan lima domain yaitu *Strategy, Technology, Organization, People, dan Environment* dapat dilihat bahwa pada domain *strategy* dengan sub domain *future development plans* (perencanaan) dan *leadership* (kepemimpinan) dalam mewujudkan kemandirian di era digitalisasi saat ini pemerintah desa di Kecamatan Manyaran belum memiliki rencana dalam pengelolaan TIK karena untuk saat ini karena masih wacana saja dari kepala desa terkait pengelolaan TIK dengan pemasangan wifi di setiap dusun, dan kepala desa juga sudah ikut terlibat, namun untuk rencana peningkatan pengetahuan TIK aparatur serta inisiatif visi terkait mewujudkan kemandirian desa dengan melalui digitalisasi ini pemerintah belum mengintegrasikan dengan aspek digitalisasi.

Kedua, untuk domain *technology* di pemerintah desa sudah tersedia Infrastruktur TIK yang memadai dan menunjang untuk mewujudkan kemandirian desa melalui pelayanan pada masyarakat serta sudah dilakukan pemeliharaan namun didalam pelaksanaan pengelolaan digitalisasi tersebut aparatur desa masih mengalami kendala seperti masalah jaringan, waktu pemrosesan (*loading*), *server down* serta untuk sub domain layanan TIK aparatur desa belum memberikan pelayanan yang berbasis digital dan menyasar langsung ke masyarakat untuk meningkatkan kemandirian di aspek ekonomi.

Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada domain *organization*, adaptabilitas aparatur desa terhadap kemajuan dan perkembangan digitalisasi saat ini dinilai sudah baik, namun masih ada beberapa aparatur desa yang belum dapat menggunakan dan memanfaatkan digitalisasi sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mendorong aparatur desa agar mau untuk selalu beradaptasi dengan kemajuan digitalisasi sebagai wujud untuk mewujudkan kemandirian desa. Sedangkan untuk kerja sama dalam upaya meningkatkan pengetahuan digitalisasi bagi aparatur desa dan masyarakat sebagai bentuk upaya mendorong terwujudnya kemandirian ini masih kurang karena dari hasil penelitian ditemukan baru Pemerintah Desa Bero dan Kepuhsari yang sudah melaksanakan sedangkan untuk kerjasama yang terjalin

biasanya masih sebatas penyebarluasan informasi melalui media sosial dengan kepala dusun, RT, atau RW.

Keempat, untuk domain *people* didapat bahwa pemerintah desa sudah memiliki tingkat kesadaran dalam pemberian akses pada aparatur desa terkait penggunaan TIK. Dalam bekerja aparatur desa juga sudah sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya bahkan mereka juga diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan pelatihan yang diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam mengoperasikan teknologi untuk kemudian diterapkan dalam melayani masyarakat meskipun masih sebatas pelatihan dengan pendamping desa atau mengikuti sosialisasi yang diadakan di Kecamatan Manyaran atau Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk ketersediaan aparatur desa juga sudah tercukupi untuk melaksanakan pelayanan bagi masyarakat sebagai pendukung terwujudnya kemandirian desa, meskipun ada beberapa yang belum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Terakhir, domain *environment* didapatkan hasil bahwa sumber daya anggaran telah direncanakan untuk menunjang proses pelayanan dan kebutuhan aparatur desa khususnya untuk menunjang peningkatan kemampuan teknologi. Disamping itu, tingkat pengetahuan dan literasi masyarakat akan pemanfaatan digitalisasi dinilai masih rata rata dan penggunaan digitalisasi oleh masyarakat sebagai upaya untuk lebih berkembang juga dinilai kurang berdampak, di sisi lain terkait kerja sama yang dilakukan dengan organisasi atau kelompok di masyarakat yang berhubungan dengan digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa ini pemerintah desa di Kecamatan Manyaran juga belum dilakukan oleh aparatur desa.

## Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan aparatur desa di Kecamatan Manyaran dalam penerapan digitalisasi untuk mewujudkan kemandirian desa yang ditinjau dan diteliti dari teori STOPE Framework diperoleh kesimpulan bahwa aparatur desa sudah berada pada tingkat rata rata karena masih ada beberapa aspek pada domain yang dipakai yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi dalam mencapai kesiapan. Seperti pada domain *strategy*, aparatur desa sudah memiliki kepemimpinan yang cukup baik namun untuk bidang perencanaan pembangunan di masa depan (*future development plans*) pemerintah desa masih belum mempunyai perencanaan sama sekali terkait pengembangan digitalisasi. Pada domain *technology* yang diteliti adalah infrastruktur TIK sudah lengkap dan sesuai kebutuhan serta sudah dilakukannya perawatan dan pemeliharaan infrastruktur, namun aspek layanan masih dirasa kurang dapat menysasar langsung pada masyarakat. Kemudian pada domain *organization* masih diperlukan upaya dalam mendorong aparatur desa untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kerjasama juga perlu dilakukan dengan instansi lain. Sedangkan untuk domain *people* dapat disimpulkan bahwa

pemerintah desa sudah memiliki kesadaran memberikan akses serta sudah terdapat kesesuaian antara pekerjaan dengan keahlian meskipun masih perlu adanya upaya peningkatan lagi. Terakhir, domain *environment* disimpulkan bahwa dalam menunjang peningkatan kemampuan sudah terdapat sumber daya anggaran yang dianggarkan namun untuk upaya peningkatan literasi digital masyarakatnya serta kerja sama dengan kelompok masyarakat masih belum maksimal.

## Referensi

- Afrizal, Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). DALAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ( E-GOVERNMENT ). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76–91.
- Ahmed Dahwan, A., & Raju, V. (2021). The role of e-readiness rank on the implementation of e-government in military institutions in Yemen. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 1029–1043. <http://annalsofrscb.ro>
- Al-Osaimi, K., Alheraish, A., & Bakry, S. (2006). An Integrated STOPE framework for e-readiness assessments. *National Computer Conference*. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.104.8254&rep=rep1&type=pdf>
- Bakry, S. H. (2004). *Development of e-government: a STOPE view*. 350(July), 339–350. <https://doi.org/10.1002/nem.529>
- Durek, V., & Redep, N. B. (2016). Review On e-Readiness Assessment Tools. *Central European Conference on Information and Intelligent Systems*, 161–250
- Eprilianto, D. F., Prabawati, I., Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., & Pradana, G. W. (2022). Analisis E-Readiness Pemerintah Desa Dalam Pengembangan e-Monografi Desa. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 189–204. doi:<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2832>
- Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022.
- Lisnawati, L., & Lestari, S. (2019). Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3390>
- Muhammad, A. S., Tyas, B. H. S., Puspitasari, C., Mardhika, J. G., & Atmajha, M. C. (2023). *The Indonesian Journal of the Social Sciences Service Transformation as a Tool for Promoting Sustainable Rural Development in Central Java*. 11(2)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (2)
- Saidah, N., Khasanah, L., & Ridloah, S. (2022). *Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village*. 6(2), 123–135. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.123-135>
- Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2011). The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review of a New Perspective on CSR and its Implications

for the Firm, Governance, and Democracy. *Journal of Management Studies*, 48(4), 899–931. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00950.x>

Tewal, B., Bawarodi, M., & Raintung, M. C. (2017). *PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT . FIF GROUP MANADO THE INFLUENCE OF LEADERSHIP TRANSACTIONAL AND ORGANIZATION CULTURE OF EMPLOYEE*. 5(2), 714–724.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Williams, C. A. (2018). *Digital Transformation of Business Models-Best Practices , Enablers and Digital Transformation of Business Models – Best Practices , Enablers and Roadmap Daniel Schallmo*